MEMFORMAT *GENDER EQUITY* PADA PENDIDIKAN DASAR

DIAH HANDAYANI

Staf pengajar tetap
Program Studi Komunikasi
dan Penyiaran Islam
STAIN KEDIRI

Abstract: The study assensially gender equity in the Elementary curriculum that served as a basis for a proposed guide in preparing gender fair instructional materials. A descriptive analysis of Elementary Studies curriculum was the primary method used in this study. The participants' perceptions on gender were compared and analyzed. Gender-fair education indicators served as criteria for comparison. The data gathered were processed qualitatively. The findings revealed that: (1) Indicators of gender biases in the learning environment were manifested in the learning environment, curriculum, and instructional processes; (2) Hidden curriculum plays an important role in informally transmitting values and attitudes in schools; (3) Leadership skill and tasks formerly given to male students were checked at present by female assertiveness; (4) Private and public school teachers and students differed in their perceptions on the learning environment; and (5) Gender-fair curriculum in Social Studies is a vital instrument in achieving equality, development, and peace.

Keywords: Gender equity, elementary school, gender fair education, learning environment.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendahuluan

Pendidikan, secara umum memain–kan peranan yang fundamental bagi perkembangan diri, baik secara individu maupun sosial. Hal ini dikarenakan tujuan utama pendidikan adalah me–ngembangkan potensi diri yang seluas-luasnya dan merealisasikan potensi tersebut (Bordieou & Passeron, 2008). Apalagi seperti yang telah diketahui bahwa pendidikan di abad 21 sangat dipengaruhi oleh dua kekuatan besar : yakni melimpahnya informasi dan arus gelombang globalisasi yang tak terben–dung. Keduanya, memberi dampak baik secara positif maupun negatif. Dampak positifnya ialah setiap orang berkesem–patan untuk mencari dan membangun interkonektivitas, menimbulkan multi–keberagaman dan daya saing tinggi tanpa dibatasi oleh aspek wilayah lokal, na–sional, maupun internasional. Akan teta–pi, dampak negatifnya ialah timbulnya marginalisasi, kekerasan, dan krisis yang berkelanjutan.

Melalui skenario ini, pendidikan diharapkan memiliki kontribusi pada pengembangan kreativitas pemberdayaan sumber daya manusia yang dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan "*intellegence revolution*" dan mampu ber–adaptasi terhadap berbagai perkemba–ngan teknologi yang berimplikasi pada tanggung jawab kita terhadap pemakaian sumber daya alam dan lingkungan fisik di sekitar kita. Sistem pendidikan seha–rusnya juga beradaptasi terhadap *trend-trend* baru yang ada di masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui upaya mediasi, interaksi, dan interelasi berbagai kekua–tan sosial atau berbagai macam isu yang mempertanyakan peranan perempuan dan peranan masyarakat asli pribumi (*indigenous*), perencanaan pembangunan perkotaan, dan manajemen lingkungan.

Arah setting pendidikan baru di negara ini lebih ditekankan pada pola pendidikan yang membebaskan dan memiliki nilai transformasi. Pembelajaran yang membebaskan dibuat bersituasi, bersifat eksperimental, dan memiliki daya cipta, dan lebih mengedepankan aksi untuk bisa mewujudkan transformasi. Guru dan murid sebagai agen pembebas bekerja secara kooperatif dan kolaboratif agar dapat mengubah dan mentransfor–masikan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Adapun tujuan dari pendidikan tranformasi adalah mempersiapkan pembelajar-pembelajar dengan pengeta–huan yang toleran dan ketrampilan bagi proses berpikir kritis dan kreatif, dan secara sosial, peduli terhadap kebutuhan nilai-nilai transformasi sosial dan institusi yang berdampak pada lahirnya demo–krasi dan pembangunan (Tujan, 2008). Hal ini membutuhkan pemikiran yang terbuka dari para siswa akan realitas sosial di sekitarnya untuk mengembang–kan kapasitas mereka untuk mengoreksi problem analisis sosial. Hal ini merupa–kan respon untuk membentuk kesadaran akan komitmen, demokrasi, dan jiwa nasionalisme.

Pentingnya Kesadaran Gender dalam Pendidikan

Konferensi Perempuan Pertama Dunia, diadakan sekitar 20 tahun yang lalu (di Meksiko City) menekankan kese–taraan antara laki-laki dan perempuan. Konferensi ini ditujukan terhadap peningkatan akses perempuan di dunia pendidikan, kesehatan, persamaan upah, dan kesempatan perempuan di dunia kerja sebagai bentuk penghargaan me–reka pada hak asasi manusia perempuan. Hal ini dikarenakan deskriminasi terha–dap perempuan semakin meluas (Amott

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

& Mattahali, 2008). Kesamaan akses perempuan terhadap sumber daya masih terhambat dan peluang mereka untuk memperoleh pendidikan tinggi dan pelatihan masih terbatas.

Efek "rumah kaca" tampaknya juga berpengaruh terhadap luasan kesem–patan perempuan di dunia bisnis, pemerintahan, dan politik. Perempuan merupakan kelompok mayoritas dari 1 trilyun orang yang hidup di garis kemiskinan dan buta huruf. Kondisi ini semakin meluas akibat kebijakan-kebijakan pada perempuan dibanding laki-laki.

Konferensi perempuan ke-IV di Beijing mendeklarasikan Deklarasi Beijing dan Platform Aksi untuk mencari afir–masi kembali komitmen pemerintah guna mengeliminasi deskriminasi terhadap perempuan dan menghilangkan segala bentuk rintangan terhadap kesetaraan (United Nations, 2012).

Pemerintah juga harus menjamin adanya perspektif gender pada kebijakan program-program untuk ditetapkan. Ter–dapat 12 area yang harus menjadi perha–tian pemerintah antara lain : 1). Kemis–kinan 2). pendidikan dan pelatihan 3). kesehatan 4). kekerasan 5). pengendalian konflik 6). ekonomi 7). pengambilan keputusan 8). mekanisme institusional 9). hak asasi manusia 10). media 11). lingkungan hidup 12). remaja dan anak-anak.

Platform dalam bidang pendidikan merekomendasikan rencana aksi untuk mendapatkan akses yang sama dalam bidang pendidikan; menutup kemung–kinan adanya kesenjangan gender di sekolah dasar dan menengah mulai tahun 2000 dan mencapai semua tingkat pendidikan di semua negara sebelum tahun 2015; mengurangi rata-rata angka buta huruf perempuan setidaknya lebih dari separuh jumlah perempuan tahun 1990; pengembangan pendidikan dan keterampilan non deskriminatif; dan mempromosikan hak pendidikan dan keterampilan seumur hidup bagi remaja dan anak-anak. Dua Konferensi Perem–puan Dunia ini menolong pembentukan arah baru di bidang pendidikan. Di mana dua arahan di bidang pendidikan ini mengarahkan pembentukan pendidikan yang membebaskan dan transformasi pada masyarakat secara universal.

Kebutuhan di bidang pendidikan di abad 21 mentransformasikan masyarakat, inovasi pendidikan mengharuskan ada–nya koreksi dan re-orientasi pemikiran pemuda pada aspek pemberdayaan (Kostas, 2009). Hal ini membantu menen–tukan dan menganalisis keberadaan dari marginalisasi, subordinasi, stereotipe peran, kekerasan personal dan struktural.

Formasi gender mengisyaratkan se–cara ideologis perempuan dan laki-laki berbeda tetapi saling melengkapi. "Seks" bekerja secara biologis dan perbedaan anatomi perempuan dan laki-laki dikons–truksi secara sosial budaya melalui gender. Hal ini menimbulkan perbedaan peran, tugas, fungsi, dan keterampilan antara perempuan dan laki-laki dari masa anak-anak hingga dewasa. Gender lalu dipupuk dan di-stereotipe-kan melalui berbagai peran yang dibangun dan dikukuhkan secara berbeda melalui institusi keluarga, agama, sekolah, dan media massa.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang ditentukan oleh sejumlah faktor yang kemudian ikut membentuk. Pembentu–kan gender ini kemudian disosialisasikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperkuat, dan dikonstruk melalui sosial budaya, dilanggengkan oleh interpelasi tafsir agama dan mitos-mitos yang menjadi keyakinan mendasar.

Penyebab Biasnya Pemahaman terhadap Gender

Van Den Berghe menyatakan bahwa keunggulan laki-laki disebabkan oleh elaborasi budaya atas biologi manusia. Hal ini didukung pula oleh pernyataan Parker & Parker (dalam Ruminiati, 2005) yang menyatakan bahwa terdapat keco–cokan yang tepat dan logis antara perbedaan jenis kelamin secara biopsi–kologis dengan pembagian kerja secara seksual/jenis kelamin, yang selanjutnya dikenal dengan teori sosiobiologis.

Teori sosiobiologis merupakan teori yang membedakan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi masyarakat yang didasarkan pada bio–logis manusia. Hal ini didukung pula oleh hasil beberapa penelitian terakhir yang membuktikan bahwa tidak adanya perbedaan intelegensia antara anak perempuan dan laki-laki. Kemampuan intelegensia ini bersifat universal sehing–ga baik perempuan maupun laki-laki bisa menggeluti bidang yang sama, terutama dalam hal pendidikan.

Patriarki

Penyebab utama munculnya perbe–daan peran antara perempuan dan laki-laki adalah budaya patriarki. Membica–rakan patriarki cenderung membahas hegemoni terhadap perempuan yang didominasi oleh laki-laki. Hegemoni laki-laki dalam masyarakat tampaknya meru–pakan fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun.

Beberapa praktik munculnya sub-ordinasi dan marginalisasi perempuan dapat berupa: (1) *suargo nunut neraka katut*, yang memiliki makna apabila laki-laki hidupnya enak istri juga ikut merasakan enak, tetapi apabila suami sengsara atau menderita istri juga ikut merasakan menderita; (2) istilah *kanca wingking*, yang artinya perempuan tidak sejajar dengan laki-laki dan berposisi dibelakang atau di daapur, bahkan ada juga predikat perempuan secara budaya istri sebagai (3) "kasur, dapur, sumur". Ketiga hal ini langgeng di daerah pedesaan maupun pinggiran.

Tafsir Agama

Sebagian kecil isi kitab suci dari berbagai agama memang masih ada yang menafsirkan masih belum bisa re-posisi gender. Salah satu contohnya ialah isi dalam Al-Qur'an sangat baik, namun "penafsirannya" sebagian kecil masih belum resposisi gender, sehingga kelom–pok orang tertentu menganggap gender "musuh agama". Sebenarnya anggapan ini kurang tepat, karena kesetaraan antara perempuan dan laki-laki telah diberlaku–kan sejak zaman Rasulullah. Contohnya, Rasul sendiri menggendong putri perem–puannya di hadapan kaum Jahiliyah. Sahabat Rasulullah seperti Ibnu Sa'ad, Ibnu Ishaf juga menyebutkan tidak kurang dari 50 orang perempuan ikut dalam perawi hadist. Begitu pula Aisyah istri Beliau juga mengambil peran penting dalam politik, sehingga terlibat dengan gagah berani dalam perang Jamal. Dengan demikian, kesetaraan gender sudah ada sejak sebelum feminis Barat lahir. Bahkan perjuangan rasul dalam mengangkat derajad perempuan dari budaya Jahiliyah sudah luar biasa, agar perempuan tidak menjadi sasaran pembunuhan demi kehormatan orang tuanya. Pembaruan tatanan ini membuk–

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tikan bahwa sebelum feminis dari Barat, Islam sudah menyetarakan perempuan dengan laki-laki. Namun setelah Rasul wafat berangsur-angsur mengalami pe–nurunan dari generasi penerus tabi'in-tabi'in hingga muncul feminisme dalam Islam. Dalam hal ini Fatimah Mernissi guru besar Sosiologi pada universitas Maroko tahun 1940, juga menganalisis teks-teks klasik dengan perspektif feminis dari hadist misoginis dari pra Islam. Penulis biografi Rasul mengatakan bahwa tidak kurang dari 1.200 sahabat perem–puan dalam berjuang menegakkan Islam, perempuan ikut memberi suara dalam memutuskan pengganti dalam per–juangan Rasul. Prinsip keadilan gender menurut Islam adalah: (1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, (2) sesama khalifah, (3) sesama menerima perjanjian primodial, (4) Adam dan Hawa sama-sama aktif dalam kosmia (5) laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi. Dengan demikian, terjawab sudah bahwa gender bukan musuh agama, namun sebaliknya.

Teori Feminis

Teori feminis mengkritik diskrimi–nasi gender yang dimunculkan oleh teori biologis. Namun, asumsi dasar feminis ini berakar pada kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) dunia privat/domes–tik dan publik.

Profil Pendidikan di Jawa Timur

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, dalam Sukesi, 2005) kondisi Pendidikan Dasar dan Menengah di Propinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa jumlah anak pendidikan usia dini (PUD) di Jawa Timur sebesar 1.189.555 anak, terdiri dari 577.214 perempuan (48,53%) dan 612.141 laki-laki (51,47%) menyebar di 29 kabupaten dan 9 kota. Jumlah tersebut paling banyak di kabupaten Malang, Jember, dan Sura–baya. Belum semua anak usia PUD bersekolah. Data anak-anak laki-laki usia PUD belum sekolah. Hal ini disebabkan karena kesadaran pendidikan orang tua pada umumnya masih rendah. Di samping itu tidak semua desa belum memiliki PUD begitu pula orang tuanpada umumnya masih rendah. Di samping itu, tidak semua desa belum memiliki PUD begitu pula orang tua lebih suka menyekolahkan anaknya langsung ke sekolah dasar. Sedangkan SD/MI 28.355 sekolah, angka putus sekolah 0,31 %, anak lulusan 99,99% ratio murid dalam kelas 24 anak, ratio murid dengan guru 16:1. Sedangkan SMP/MTs jumlah sekolah mencapai 5.426 sekolah, angka putus sekolah 0,35%, angka lulusan 99,98% ratio murid dalam kelas 39 anak, ratio murid dengan guru 14:1. Sedangakn SMA/MA jumlah sekolah mencapai 2.912, angka putus sekolah 0,96%, angka lulusan 99,65%, ratio murid dalam kelas 41 anak, ratio murid dengan guru 12:1.

Angka putus sekolah tersebut dise–babkan karena masalah sosial ekonomi orang tua yang masih rendah sehingga anak cenderung membantu orang tua untuk mencari nafkah diantaranya menjadi anak jalanan (anjal). Hal tersebut didukung dengan adanya pendidikan orang tua meski rendah sehingga kesadaran untuk menyekolahkan anak juga rendah.

Di perkotaan seperti di kota Malang Jawa Timur, hampir semua penempatan poros jalan terdapat anak jalanan usia sekolah pendidikan dasar. Tidak semua anjal menjadi pengemis tetapi ada yang unsur ekonomi mencari uang seperti menjual koran, mainan, makanan dan sebagainya yang pada dasarnya mencari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Untuk mengatasi anjal seharusnya terdapat kerjasama antara pemerintah daerah, LSM, dan partisipan pendidikan. Kemungkinan penanggulan anjal sebaik–nya juga tidak selamanya memaknai anjal sebagai sesuatu yang negatif yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi perlu dilihat bahwa mereka hadir karena adanya keterdesakan ekonomi, banayak diantara mereka terpaksa turun ke jala–nan untuk menjajakan makan dan minuman bahkan servis untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Sehingga arah pembinaan terhadap mereka juga perlu dilakukan. Apalagi menyangkut tentang sekolah. Upaya yang dilakukan hendaknya tidak membuat mereka putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali. Mereka tetap diupayakan untuk tetap sekolah akan tetapi juga perlu terdapat upaya pembinaan ketarmpilan dan pengetahuan mereka untuk mening–katkan taraf hidup anak-anak jalanan tersebut.

Contoh lain, masalah jumlah angka putus sekolah di wilayah kabupaten/Kota Kediri antara anak laki-laki dan perem–puan lebih besar anak laki-laki diban–dingkan anak perempuan. Anak laki-laki berjumlah 826 dan anak perempuan 552 anak. Begitu pula dalam penanganan anka putus sekolah dengan menggu–nakan beasiswa jumlah anak perempuan lebih banyak yang menerima beasiswa yakni berjumlah 4789 (55,91%) pada jenajang sekolah dasar, 1592 (60,81%) pada jenjang SMP, 1551 (52,88%) pada jenjang SMA, dan 168 (61,99%) pada jenjang perguruan tinggi. Dari data tersebut terbukti bahwa siswa perempuan lebih dapat berprestasi dari pada anak laki-laki (Sumber : BPS Kota Kediri, 2008).

Permasalahan Bias Gender Bidang Pendidikan

Praktik bias gender[1] dalam pendi–dikan masih berakar kuat. Beberapa contoh praktik bias gender dapat dilihat dari studi yang dilakukan oleh Logsdon (1985), Nurhaeni dan Sudibyo (2006). Logsdon menemukan bias gender yang melestarikan ideologi gender (nilai-nilai patriarki) lewat pelajaran di sekolah. Selain itu ada stereotype[2] gender yang ditampilkan lewat ilustrasi aktivitas tradisional perempuan dan penggunaan alat-alat industri modern oleh laki-laki. Berdasarkan pendapat tersebut, semua peran dan aktivitas yang digambarkan untuk anak laki-laki dan perempuan dipilih berdasarkan stereotype gender. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa anak laki-laki dengan sengaja disiapkan untuk menjadi "lebih" (dalam segala hal), sebaliknya anak perempuan seolah dimatikan potensinya sejak memasuki usia SD (Rostiawati, dalam Widiastono (ed), 2002: 151-152). Hasil studi Nurhaeni dan Sudibyo (2006: 56) menunjukkan adanya bias gender dalam materi bahan ajar lokal, dimana laki-laki dominan dalam peran produktif/publik dan perempuan dominan dalam peran reproduktif/domestik. Pemahaman guru

[1] Bias gender adalah suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan (KPPRI, UNFA, BKKBN, 2004:35). Bias gender biasanya termanifestasi dalam bentuk dimana salah satu jenis kelamin (biasanya laki-laki) digambarkan melakukan peran, kedudukan, dan tanggung jawab yang selalu lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin yang lain. Padahal realitas di lapangan, peran, kedudukan, dan tanggung jawab tersebut bisa saling dipertukarkan.

[2] Stereotype adalah citra baku yang melekat pada peran, fungsi, dan tanggung jawab yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat (KPPRI, UNFA, BKKBN, 2004: 35). Citra baku ini biasanya merugikan salah satu jenis kelamin, seperti : laki-laki kuat, agresif, pencari nafkah utama, perempuan lemah, lamban, pencari nafkah tambahan, dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kesetaraan dan keadilan gender masih rendah dan bias, dan ada bias gender dalam proses pembelajaran. Selain contoh-contoh tersebut di atas, pada Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 dinyatakan bahwa : (i) materi bahan ajar pada umumnya masih bias gender; (ii) proses pembelajaran dikelas belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan; (iii) lingkungan fisik sekolah belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan; (iv) pengelolaan pendidikan belum adil gender atau memberikan peluang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Lihat Permen–diknas 84 tahun 2008).

Praktik-praktik bias gender di bidang pendidikan ini tidak bisa dibiarkan terus menerus mengingat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki akan berkon–tribusi secara optimal dalam peningkatan kesejahteraan suatu negara. Menurut Wolfensohn dalam menghambat pemba–ngunan. Ketidakpedulian Bank Dunia (2005:xi-xii), kesenjangan gender akan sangat merugikan kesejahteraan manusia dan membatasi kemampuan negara untuk menyelenggarakan pembangunan yang lebih efektif, isu gender harus selalu dimasukkan dalam setiap analisis, ranca–ngan dan implementasi kebijakan.

Selain hal tersebut di atas, beberapa dampak yang mungkin terjadi karena adanya bias gender dalam pendidikan antara lain : (1) Lestarinya budaya yang mengunggulkan laki-laki daripada pe–rempuan; (2) pembentukan cita-cita yang berbeda antara laki-laki dan perempuan; (3) peserta didik mengalami kesulitan menyesuaian diri terhadap berbagai peran yang harus mereka jalani ketika dewasa; (4) kurangnya minat peserta didik perempuan atau laki-laki terhadap mata pelajaran tertentu; (5) adanya kecenderungan peserta didik lak-laki atau perempuan akan berprestasi lebih baik di bidang atau pelajaran tertentu.

Sejak tahun 2001, wakil ketua komisi UU DPR RI Surya Candra Surapaty, berinisiatif melakukan revisi buku ajar yang dianggap belum setara gender. Ide perevisian tersebut ditanggapi positif oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pemberdayaan Perempuan. Se–lain itu para pendidik, penulis buku ajar, dan para pemerhati pendidikan pada masa itu sebagian juga menanggapi himbauan tersebut. Begitupun hasil penelitian tahun 2005 dan 2007 menunjukkan bahwa pembelajaran dalam pendidikan dasar terutama di sekolah dasar, cenderung belum keadilan gender. Hasil temuan penelitian dari 7 Sekolah Dasar swasta di kabupaten maupun di kota Kediri bernuansa Islami, Kristen, dan umum menunjukkan bahwa hampir seluruh komponen pembelajaran belum responsif gender. Komponen yang dimaksud meliputi buku ajar, teknik pembelajaran, media, evaluasi, model pembelajaran, dan penugasan, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan kurikulumnya. Bahkan, kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolahpun, juga cenderung masih belum responsif gender. Dengan penjabaran sebagai berikut: .

Materi Ajar dalam Buku Teks

Materi ajar dari berbagai penerbit maupun pengarang, mulai kelas satu sampai kelas enam, masih cenderung menampakkan adanya belum berkeadilan gender. Gambar-gambar ilustrasi mau–pun isi materi juga belum mencirikan adanya keadilan gender. Buku penunjang yang digunakan di 7 sekolah tersebut juga cenderung buku-buku yang belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setara gender. Contoh buku ajar yang belum sensitif gender.

Pada buku ilmu pengetahuan sosial untuk kelas empat sekolah dasar yang diterbitkan oleh penerbit tertentu, terda–pat ungkapan sebagai berikut: *"seni budaya dapat dilihat dari rumah adat, pakaian daerah, senjata tradisional, dan tari-tarian rakyat. Rumah adat Madura, tempat mene–rima tamu dipisah antara tamu laki-laki di depan sedang tamu perempuan di belakang."*

Ketidakadilan gender tersebut ditun–jukkan dengan adanya pemisahan tempat penerimaan tamu dengan tamu pria berada di depan sedangkan tamu perem–puan di belakang. Penempatan perem–puan di ruang belakang sementara laki-laki di ruang depan merupakan bukti terjadinya bias gender. Hal ini sesuai dengan temuan hasil penelitian Muthali'in (2001) yang menyatakan bahwa mitos-mitos budaya patriarki menghegemoni dan mengkonstruksi perempuan sebagai *konco wingking*, yaitu menempatkan perempuan secara budaya tidak sejajar dengan laki-laki. Seharusnya, kalimat terakhir ditulis secara netral sebagai berikut: *"Seni budaya dapat dilihat dari rumah adat, pakaian daerah, senjata tradisional, dan tari-tarian rakyat. Rumah adat Madura, tempat menerima tamu dipisah antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan".*

Kalimat-kalimat sederhana di atas dikonsumsi oleh siswa SD yang memakai buku tersebut untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan bidang sosial, sampai pada taraf tertentu siswa akan terhegemoni bahwa anak perempuan tidak pantas duduk diruang depan. Bukan saja dalam bentuk pernyataan, dalam gambar-gambar pun juga mengilustrasikan wujud yang belum setara gender. Dalam pemberian tugas pun cenderung belum setara gender sebagai contoh **pemimpin upacara** selalu digambarkan sebagai seorang anak laki-laki. Pembagian peran seperti ini masih cenderung eksis dan tertuang dalam materi pembelajaran. Kondisi seperti ini hendaknya diper–hatikan oleh semua pihak khususnya para penulis buku ajar. Sebenarnya akhir-akhir ini buku-buku ajar sudah mulai ada yang ramah pada kalimat-kalimat dan gambar-gambar ilustrasi yang mulai setara gender, namun proporsinya masih sedikit dan belum menyeluruh pada semua terbitan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara terus mene–rus kepada para pengarang maupun penerbit buku ajar. Bahwa, Diknas pun perlu mengeluarkan peraturan tentang seleksi buku-buku yang telah terbit untuk direvisi pada terbitan berikutnya, walaupun sudah ada perubahan namun masih belum menunjukkan pada keadilan gender.

Teknik pembelajaran dalam pelak–sanaan pembelajaran yang belum menci–rikan adanya keadilan gender. Sebagai contoh, saat berdiskusi biasanya peran pemimpin diskusi cenderung lebih ba–nyak di posisikan pada anak laki-laki. Pemimpin diskusi seharusnya lebih dite–kankan pada kemampuan siswa, bukan pada jenis kelamin. Hal ini menurut Parker & Parker (1979) cenderung lebih disebabkan oleh perbedaan biologis yang menganggap otak anak perempuan lebih kecil dari pada otak anak laki-laki, sehingga laki-laki dianggap lebih pandai dari pada anak perempuan. Anggapan intelegensia anak perempuan lebih ren–dah disanggah oleh temuan peneliti Sapiro (1990) yang didukung oleh temuan peneliti Franz Boas (1991) yang menga–takan bahwa meskipun otak perempuan lebih kecil dari pada otak laki-laki namun memiliki rasional yang sama. Apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian peran yang tidak seimbang seperti dalam proses pembelajaran anak usia pendidikan dasar secara terus menerus, akibatnya akan menghegemoni pikiran siswa, pada akhirnya akan terbentuk pola pikir siswa, yang terkait dengan pembagian peran publik dan domestik.

Media pembelajaran juga tidak menampakan adanya penggunaan media pembelajaran yang berorientasi pada keadilan gender. Tidak ditemukan kelaas yang memasang gambar pahlwan yang berjenis kelamin perempuan di dinding kelas. Semua gambar para pahlawan kemerdekaan yang dipajang di dinding kelas berjenis kelamin laki-laki. Seha–rusnya yang dipasang gambar pahlawan laki-laki dan perempuan seperti Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, R.A. Kartini, maupun yang lain.

Hal ini didasarkan pada konstruksi budaya patriarki yang beranggapan bahwa perempuan cukup melakukan aktivitas domestik, sementara aktivitas publik ditangani langsung oleh laki-laki. Perangfisik dilakukan oleh laki-laki, sementara perempuan bertanggung ja–wab pada urusan konsumsi atau sekretaris. Pemikiran tersebut berkem–bang bahwa pahlawan identik diperang fisik. Akibatnya anak yang dalam kehidupannya berlatar budaya patriarki, maka yang diakui sebagai pahlawan hanyalah yang berperang secara fisik, sementara perjuangan nonfisik, seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika yang berjuang dalam pendidikan cenderung kurang diakui sebagai pahlawan karena tidak ikut ke medan perang.

Evaluasi pembelajaran, sebagaimana materi ajar pada evaluasi pembelajaran juga tampak belum berkeadilan gender. Sejumlah soal masih menunjukkan akti–vitas publik yang diperankan oleh laki-laki dan aktivitas domestik diperankan oleh perempuan. Contoh polisi di sam–ping dilakukan oleh laki-laki juga ada polisi perempuan (polwan), pesawat di samping dilakukan oleh perempuan juga ada pesawat laki-laki, dan dokter di samping diperankan oleh laki-laki juga diperankan oleh perempuan.

Penugasan siswa dikelas, guru dalam memberikan tugas sehari-hari para siswa belum berkeadilan gender, sebaiknya sesuai dengan kebutuhan, maksudnya tidak membedakan jenis kelamin sebagi contoh memberi tugas sebagai ketua kelas, dengan pemilihan secara demo–krasi, bukan atas dasar penunjukkan guru, bisanya ketua kelas yangdipilih adalah siswa laki-laki yang tubuhnya besar dan pemberani, tanpa memikirkan teman-temannya menyukai apa tidak, walaupun sebagian kecil sudah mulai ada yang secara demokrasi. Dengan demikian anak perempuan mulai dibiasakan memimpin kelas.

Kebijakan pengelola sekolah cende–rung belum berkeadilan gender dari 7 sekolah yang menjadi objek penelitian, pemimpin sekolah masih didominasi oleh kepala sekolahlaki-laki. Hasil temuan menunjukkan tiga sekolah sudah hampir satu abad berdiri selalu dipimpin oleh kepala sekolah laki-laki dengan alasan biologi laki-laki lebih cocok dari pada biologi perempuan untuk dijadikan pemimpin sekolah. Dua sekolah mulai setara gender, namun dalam kondisi darurat, sekolah kekurangan murid sehingga pemimpin sekolah diserahkan pada perempuan. Satu sekolah sudah berdiri 51 tahun juga belum pernah sekalipun dipimpin kepala sekolah perempuan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal perempuan sendiri, karena sekolah nuansa militer pengelolanya istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

militer namun mau tidak mau kepala sekolah perempuan. Karena di anggap emosional dan tidak bisa memimpin sekolah, hanya sekolah yang kebijakannya betul-betul sudah setara gender. Saat sekarang kepala sekolahnya juga perempuan, atas dasar kemampuan bukan jenis kelamin.

Implementasi Pendidikan Berwawasan Gender pada Sekolah Dasar

Tujuan pendidikan berwawasan gender ialah mewujudkan kesempatan pendidikan dan adil gender pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, mendorong peningkatan mutu dan efisiensi melalui pemberdayaan potensi perempuan dan laki-laki secara optimal, dan memperkecil ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan baik jenjang pendidikan menengah, jenjang pendidikan tinggi, maupun pada jalur pendidikan nonformal (Yulaelawati dalam Sardjunani dan Sulistyowati (Eds), 2008: ix).

Secara nyata pendidikan berwawasan gender berusaha untuk memberdayakan manusia, melalui transfer pengetahuan dan pengalihan nilai-nilai sosial budaya yang membantu pertumbuhan kekuatan pada manusia, yaitu kekuatan untuk berbuat, kekuatan untuk membangun kerjasama dan kekuatan dalam diri pribadi manusia yang dilakukan berdasarkan prinsip egaliter, dimana laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya, dan mereka diperlakukan sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan pengalamnnya.

Nurhaeni (2013) mengembangkan model integrasi kesetaraan gender pada satuan pendidikan sebagaimana digambarkan dalam gambar 1.

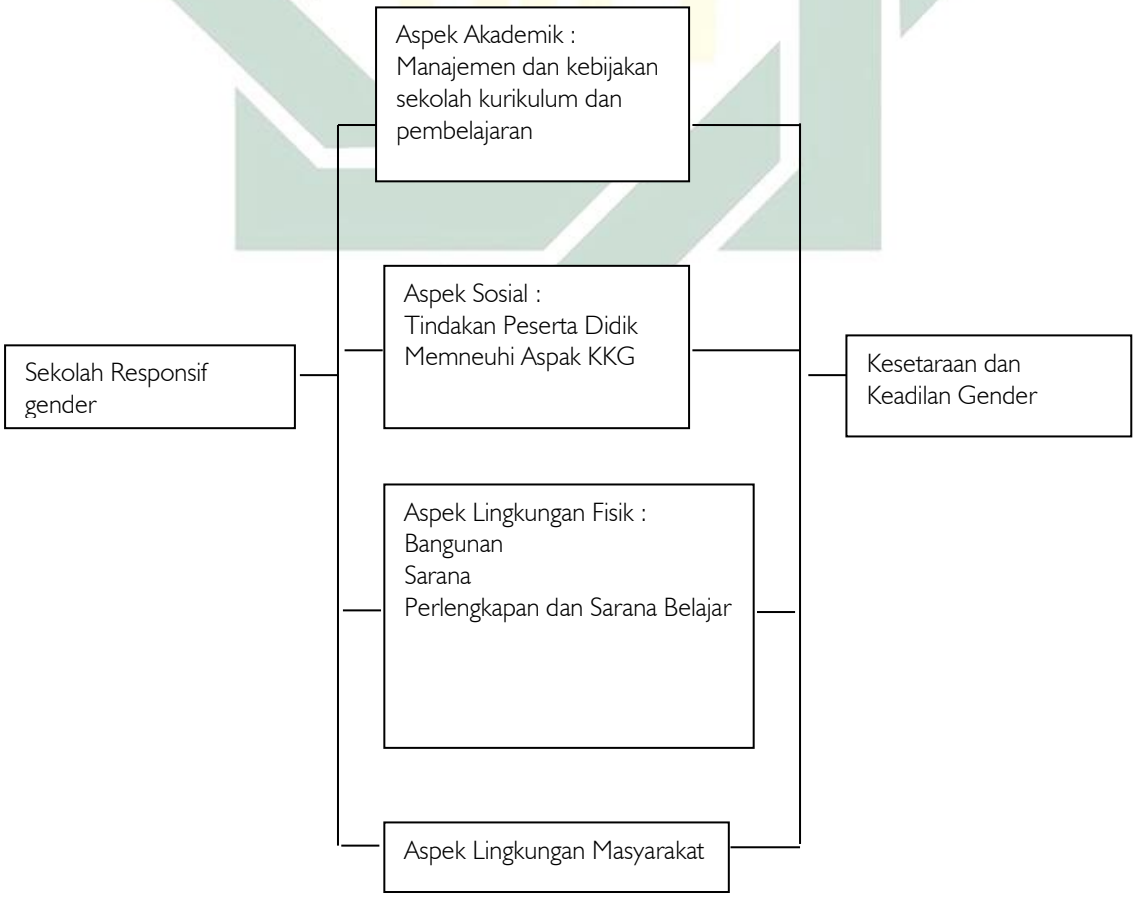

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat mewujudkan pendidikan berwawasan gender, antara lain :

1. Tenaga pendidik maupun masyarakat harus memiliki sensitivitas gender, yaitu kemampuan dan kepekaan dalam melihat dan menilai berbagai aspek kehidupan dan hasil pembangunan dari perspektif gender (dimana ada perbedaan, aspirasi, kebutuhan, dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan).
2. Melakukan perubahan pandangan dari bias/netral/buta gender[3] menjadi responsif gender. Responsif gender adalah kemampuan merespon perbedaan kebutuhan, aspirasi, maupun pengalaman perempuan dan laki-laki dalam proses pendidikan. Dengan responsif gender berarti kegiatan pendidikan sudah memperhatikan berbagai pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan pada berbagai aspek kehidupan baik laki-laki maupun perempuan.
3. Mengintegrasikan pesan keadilan dan kesetaraan gender dalam bahan pelajaran, dimana pesan yang disampaikan dilakukan sesuai denan konteks dan isi substansi materi yang diajarkan.
4. Adanya penyusunan perencanaan dan anggaran pendidikan responsif gender. Dengan anggaran responsif gender maka anggaran yang dikeluarkan beserta kebijakan dan program pendidikan dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan stiap warga belajar dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks pendidikan, anggaran responsif gender mencakup seluruh anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan. Alokasi anggaran dapat dikategorikan ke dalam : (a) alokasi untuk kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki[4]; (b) alokasi untuk meningkatkan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan (*affirmatve action*)[5]; (c) alokasi untuk pelembagaan kesetaraan gender[6] dan (d) alokasi anggaran umum (integrasi gender)[7].
5. Pembelajaran Responsif Gender
   Pembelajaran responsif gender adalah proses pembeajaran yang senantiasa memberikan perhatian seimbang bagi kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan. Pada pembelajaran responsif gender harus memperhatikan berbagai pendekatan belajar yang memenuhi kaidah kesetaraan dan keadilan gender, baik melalui proses perencanaan pembelajaran, interaksi belajar-mengajar, pengelolaan kelas, maupun dalam evaluasi hasil belajar.
   Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran responsif gender adalah :
   a. Materi atau konten pembelajaran tidak mengandung stereotype gender

[3] Buta gender adalah tidak adanya kemampuan untuke memahami atau mengerti tentang gender. Netral gender adalah kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. Bias gender adalah kondisi yang menguntungkan pada salah satu jenis kelamin yang berakibat munculnya permasalahan gender.

[4] Contoh : penyediaan pembalut perempuan, pil nyeri haid, dll.

[5] Contoh : pemberian latihan kepemimpinan bagi guru yang memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai kepala sekolah.

[6] Contoh : pelatihan tentang pengarusutamaan gender bidang pendidikan bagi kepala sekolah, guru, dewan komite.

[7] Contoh : pemberian beasiswa kepada siswa miskin perempuan maupun laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metodologi dan pendekatan me–ngajar harus dapat memastikan partisipasi yang setara dan seim–bang antara peserta didik laki-laki dan perempuan.
c. Kegiatan pembelajaran harus da–pat menjamin agar semua siswa dapat berpartisipasi dalam seluuh kegiatan pembelajaran, dengan tanpa kecuali.
d. Tata letak ruang kelas harus memungkinkan adanya partisi–pasi yang seimbang antara peserta didik laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi dengan guru
e. Ada perencanaan untuk me–ngelola kesetaraan dan keadilan gender dalam kelas seperti kese–hatan reproduksi, pelecehan seksual, kekerasan dalam berpa–caran, dan sebagainya.
f. Ada umpan balik dan penilaian dari siswa laki-laki dan perem–puan dan mengetahui bagaimana siswa-siswa memahami pelajaran yang diberikan. Dengan permasa–lahan yang berlainan, peserta didik yang berlainan jenis akan membutuhkan tindak lanjut yang berbeda dalam menangani masa–lah kemunduran belajar mereka masing-masing (Depdiknas, 2008).
g. Penggunaan bahasa yang akan mendorong tumbuhnya lingku–ngan belajar yang lebih kondusif bag laki-laki dan perempuan untuk belajar dengan baik dan mendorong mereka mempunyai kemampuan adaptasi yang optimal.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas da–pat diambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan pada proses sosialisasi primer pendidikan yaitu pada masa pendidikan Sekolah Dasar mengandung informasibias gender, baik dalam bentuk marginalisasi atau peminggiran salah satu gender, meno–merduakan (subordinasi), beban kerja ganda, perilaku atau tindakan kekerasan, dan pencitraan, atau pelabelan negatif terhadap salah satu pihak.

Kenyataan bahwa isu gender dapat dikonstruksikan berdasarkan jenis kela–min, bukan pada konstruksi berdasarkan peran dantanggung jawab saja. Tetapi selalu melihat perempuan sebagai entitas unik yang selalu bertentangan secara biologis dari laki-laki. Pada tahap ini peran pendidikan dan persepsi guru di sekolah tentu harus diubah dengan melihat isu gender secara sosial, bukan melalui biologis.

Francis (2000, hlm. 15) memberikan argumen menarik tentang hal ini. Baginya, dunia pendidikan harus melihat lebih banyak persolan gender dari perspektif sosial dan psikologis daripada biologis. Hal ini dikarenakan, '*there is one (notional), masculinity and one (notional) femininity constructed as oppositional to one another, and consequently shifting, but flexible and incoorporating contradictions*'. Akhirnya, perbedaan pandangan yang mengemuka lebih banyak pada aspek biologis (perempuan dan laki-laki) sehingga hegemoni maskulin terus berlangsung terhadap femininitas. Hal ini juga menandakan basis pandangan dan argumen biologis dari gender sangat bersifat individual dan tidak melihat peran, fungsi, dan tanggung jawab secara sosial. []

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Dian Rakyat. 2005. *Pembangunan Berperspektif Gender : Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia.* Jakarta : Dian Rakyat.

Fakih Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Go, Daniel dan Timothy Wibowo. 2010. *The Embryo of Success*. Jakarta: Gramedia.

Ihromi, T.O. 1995. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI. UNFPA dan BKKBN. 2004. *Bunga Rampai Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: KEPPRI, UNFPA, BKKBN.

Longsdon, Martha. 1985. *Gender Role In Elemntery. Text In Indonesia* dalam Goodman, M. Women In Asia and the Spesific towards an East-West Dalogue. University of Hawaii: The Women's Studies Program.

Mosse, Julia Cleves. 2003. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center dengan Pustaka Pelajar.

Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti dan Sudibyo, D. Priyo. 2006. *Pemahaman Tentang Pendidik Sekolah Dasar Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender di Surakarta*. Artikel dimuat dalam Jurnal Egaliter Nomor 1/ Novenber 2006. ISSN: 1978-273X.

---------.2013. *Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. : Model Integrasi dan Keadilan Gender Pada Satuan Pendidikan Formal*. Surakarta: UNS Press.

Parawansa, Kofifah Indar. 2006. *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tenatang Keserasian Jender*. Jakarta: LP3ES.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahuan 2008 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Tillar. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta.

Unesco. 2002. *Panduan Perencanaan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Asia Timur dan Asia Tenggara*. Jakarta.

Widiastono, Tonny D (ed). 2002. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Kompas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id